



IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI: STUDI KASUS KAWASAN TAMAN WISATA ALAM KAWAH IJEN

Bayu Krisna Ardiansyah^{1, *}, Rizari², Hendrawati Hamid³

¹Pemerintah Provinsi Jawa Timur

ardiansyah.10bayu@gmail.com, Jl. Pahlawan No. 10 Surabaya, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor

rizari@ipdn.ac.id, Jln. Ir. Soekarno Km. 20, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

hendrawati@ipdn.ac.id, Kampili Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

* Corresponding Author

Email: ardiansyah.10bayu@gmail.com

Abstract

This article is a follow-up study from Irawan research's in 2015 about the Implementation of Tourism Development Policy which discusses all of tourist objects in Banyuwangi. It become the main focus of tourist destinations in the Banyuwangi Tourism Development Master Plan, but infrastructure and marketing of the Kawah Ijen Nature Park have not been priority. This study aims to find out how the Implementation of Tourism Development Policy in the Kawah Ijen Nature Park Banyuwangi. Researchers used research methods with qualitative methods with a post-positivist approach. The author sharpens the object of study only at the research object in Kawah Ijen Nature Park, annalize with different perspective from previous study, namely the content of policy and the context of implementation as determinant indicator of public policy outcomes. The results are the high types of benefits for community, the degree of change looks good and has increased human resources. Although compliance and responsiveness in implementing policies are still weak due to lack of communication between policymakers and implementers. The conclusion shows the implementation of tourism development policy in Kawah Ijen Nature Park has been going well enough. The suggestion to improve policy implementation, by collaborate all of elements of policy implementers, the private sector and the community.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development, Kawah Ijen Nature Park

Abstrak

Artikel ini merupakan penelitian lanjutan dari studi yang dilakukan oleh Irawan pada tahun 2015 tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang membahas seluruh objek kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun menjadi fokus utama destinasi wisata dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Banyuwangi, namun infrastruktur dan pemasaran Kawasan TWA Kawah Ijen belum menjadi Prioritas utama pada penelitian tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan pada Kawasan TWA Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist. Penulis mempertajam objek studi hanya pada lokasi penelitian yaitu Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Serta melalui analisis pada kacamata yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks kebijakan) sebagai indikator penentu hasil kebijakan publik. Hasil penelitian ini adalah tingginya tipe manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, derajat perubahan yang terlihat baik dan sumber daya yang dilibatkan telah mengalami peningkatan, meskipun kepatuhan dan daya tanggap melaksanakan kebijakan masih lemah dikarenakan kurangnya komunikasi antara pengambil kebijakan dengan pelaksana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Kawasan TWA Kawah Ijen telah berjalan dengan cukup baik. Adapun saran peneliti untuk meningkatkan implementasi kebijakan adalah sinergitas dalam pembangunan kepariwisataan melalui keterlibatan seluruh unsur pelaksana kebijakan, sektor swasta dan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, TWA Kawah Ijen.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan pada sektor industri pariwisata, dengan capaian sebesar (6,8 %) pada tahun 2014. Hal ini telah melampaui dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar (5,7 %), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019). Sektor pariwisata berkontribusi Rp 347 triliun atau sekitar (3,8 %) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengembangan Kepariwisata di Indonesia menjadi fokus pengembangan dan pembangunan nasional guna menumbuhkan tingkat perekonomian Indonesia. Pernyataan ini telah dibahas dalam penelitian oleh Noveria yang menjelaskan Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang menjadi salah satu sektor perekonomian yang penting bagi negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia (Noveria, 2015).

Pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Eri Irawan dalam penelitiannya pada tahun 2015 menegaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi melakukan pengembangan dan peningkatan pada sektor pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi (Irawan, 2015). Salah satu sektor pariwisata dengan sebutan triangle diamond di Kabupaten Banyuwangi yaitu TWA Kawah Ijen.

Penelitian ini menjadi lebih menarik karena Kawah Ijen merupakan kawasan wisata alam yang mempunyai daya tarik dan ciri khas yakni *blue fire* (Pmkab. Banyuwangi, 2019). Keunikan *blue fire* ini merupakan suatu keunikan yang dimiliki gunung berapi aktif dengan mengeluarkan cahaya api yang berwarna kebiru-biruan. Selain itu TWA Kawah Ijen juga memberikan suasana alam yang sejuk dan indah. Daya tarik lainnya berupa budaya yang sudah dikenal secara internasional dan sering dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara (Prabhawati, 2018). Hal ini menjadikan Kawah Ijen kawasan ekowisata yang akan dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dijadikan kawasan kepariwisataan internasional.

Penerapan prinsip pengelolaan ekowisata yang tepat di Kawah Ijen perlu di implementasikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing Kawah Ijen sebagai tujuan wisata yang berkelanjutan dan kompetitif (Putri, 2015). Pernyataan tersebut memiliki kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur kepariwisataan. Dalam kebijakan tersebut tidak hanya terfokus pada

peningkatan kepariwisataan tetapi terdapat infrastruktur pariwisata dan pemasaran pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat perkembangan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kawasan TWA Kawah Ijen yang kebanyakan berasal dari wisatawan dalam negeri sebesar (79.09 %) sedangkan sisanya adalah wisatawan luar negeri sebesar (20.91 %) (Pmkab. Banyuwangi, 2019). Secara signifikan data tersebut, menunjukkan perbedaan antara jumlah kunjungan wisatawan domestik dengan wisatawan asing. Hal ini menimbulkan permasalahan pada kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, meskipun mengalami peningkatan wisatawan yang datang untuk mengunjungi destinasi wisata di TWA Kawah Ijen.

Permasalahan lainnya dalam pengembangan kepariwisataan daerah khususnya di Kawasan TWA Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi antara lain :

- (1) Amenitas (infrastruktur penunjang) yang belum lengkap.
- (2) Infrastruktur Utama masih dalam peningkatan dan perbaikan.
- (3) Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kawasan Destinasi masih dalam pembangunan.
- (4) Peningkatan infrastruktur pariwisata terkendala oleh keadaan geografis dan dana.

Keadaan Infrastruktur Pariwisata di Kawasan TWA Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi, berupa bangunan TIC dan Shelter yang berjumlah 5 (lima) yang dibangun pada tahun 2012-2014, Air bersih dan Paving yang mengalir sampai ke Paltuding pada tahun 2014, dan Shelter/Rest Area Jambu sepanjang jalan menuju Paltuding Kawah Ijen. Untuk jaringan komunikasi hanya terdapat 1 (satu) tower sinyal komunikasi dan jalan sebagian berupa aspal dengan ukuran lebar jalan 5 (lima) meter (Pmkab. Banyuwangi, 2019). Hal tersebut masih dikatakan jauh dari skala prioritas pembangunan kepariwisataan seperti Jalan utama bisa berpapasan 2 (dua) bus dan ketersediaan fasilitas infrastruktur pariwisata penunjang (Kemenparekraf, 2019). Pembangunan kepariwisataan harus sesuai dengan skala yang telah ditentukan agar terciptanya kualitas kepariwisataan nasional.

Penulis juga tertarik untuk mengangkat penelitian ini karena Kawasan TWA Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan wisata yang mengalami peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan. Tetapi terdapat berbagai permasalahan yang ditimbulkan dan mengikuti pelaksanaan implementasi kebijakan dalam pengembangan kepariwisataan yang khususnya di TWA Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi. Harapannya untuk bisa memunculkan model kebijakan pariwisata yang ideal untuk meningkatkan

infrastruktur pariwisata serta mampu dikenal oleh wisatawan internasional/wisatawan asing.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banyuwangi telah menjadi bahasan dalam sejumlah penelitian kebijakan pemerintahan. Irawan melakukan penelitian tentang Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan Kebijakan pemerintah mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu arah strategi kebijakan yang diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur, konsolidasi budaya, peningkatan kelestarian lingkungan, dan penguatan citra daerah (rebranding) (Irawan, 2015).

Selanjutnya penelitian Putri, yang meneliti Manajemen Strategis Pariwisata Berbasis Alam di Kawah Ijen dalam Konteks Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan juga merupakan suatu agenda global atau internasional dalam setiap proses pembangunan (Putri, 2015). Ainunnisa Fitria juga berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi agenda global dalam setiap proses pembangunan (Fitria, 2013). Oleh karenanya, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk di dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

Penelitian Putri tersebut menjelaskan bahwa pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata harus memasukkan prinsip-prinsip ekowisata. Studi terkait infrastruktur pariwisata juga dilakukan oleh Mandic dkk yang mengeksplorasi keterkaitan antara infrastruktur pariwisata, fasilitas rekreasi dan pengembangan pariwisata (Mandic et al., 2018). Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Infrastruktur membentuk elemen yang sangat diperlukan dari tujuan wisata kontemporer, seperangkat fasilitas pariwisata yang pernah memberikan fokus pada pengiriman kebutuhan pengunjung.

Penelitian berikutnya oleh Novitansi dan Wismayanti tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor usaha mikro kecil menengah (umkm) di objek wisata pulau merah kabupaten banyuwangi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dalam peningkatan sektor UMKM di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 sudah berjalan dengan baik (Novitansi & Wiwin, 2015). Dimana fakta di lapangan menunjukkan dampak positif seperti beralihnya

profesi masyarakat sekitar objek wisata dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih baik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas tersebut, rata-rata banyak menghasilkan dan menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi secara lingkup yang luas, kecuali (Putri, 2015) yang menelaah Manajemen Strategis Pariwisata Berbasis Alam di Kawah Ijen dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan. Putri langsung memfokuskan diri pada manajemen strategi pariwisata yang terfokus juga pada metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari studi yang dilakukan oleh Irawan pada tahun 2015 dan terinspirasi dari beberapa penelitian diatas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Irawan, Novitansi, dan Putri terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada satu objek destinasi wisata yaitu Kawasan TWA Kawah Ijen dengan metode analisis menggunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan Grindle. Peneliti juga memfokuskan penelitian pada peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemasaran pariwisata (Ijen Jazz Festival). Dimana penulis memandang destinasi wisata dan rencana pengembangan kepariwisataan melalui peningkatan infrastruktur pariwisata dan banyuwangi festival (Ijen Jazz Festival) tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan destinasi wisata internasional.

Grindle mengidentifikasi 2 (dua) hal yang mampu menentukan tingkat keberhasilan dari suatu implementasi adalah isi kebijakan dan konteks dari implementasi kebijakan (Grindle, 1980). Isi kebijakan meliputi: Kepentingan yang terpengaruh kebijakan; Tipe Manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; para pelaksana program; dan sumber daya yang dikerahkan. Konteks implementasi terdiri dari; kekuatan, kepentingan strategis pelaksana yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Selain kedua faktor di atas, diperlukan pula mengukur proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu bagaimana tercapainya atau tidaknya suatu tujuan yang ingin diraih (Agustino, 2014). Dalam pengukuran *outcomes* dapat dilihat dari 2 (dua) faktor yaitu: efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengembangkan hasil pemikiran studi terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan

pembangunan kepariwisataan pada Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi.

II. METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *post-positivist*. Menurut sugiyono menjelaskan, bahwa metode pengumpulan data menggunakan Triangulasi Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi (Sugiyono, 2014). Metode analisa data dengan Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi Data untuk menarik kesimpulan dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Dalam penelitian penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 20 orang informan yang terdiri informan internal (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubbag Umum BBKSDA Prov. Jawa Timur, Kepala SKW V/Banyuwangi, Kasie. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata, Camat Licin, Kepala Desa Taman Sari dan Kepala RKW 18 Kawah Ijen) dan informan eksternal (5 pengujung dan 5 warga setempat dan pedagang sekitar).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa hasil penelitian, peneliti mengacu pada kerangka teori dan kajian literatur ilmiah, baik dari pandangan mengenai keilmuan kebijakan publik maupun dari pandangan mengenai teori kepariwisataan. Kerangka teori yang digunakan yakni Model Kebijakan Grindle dan Konsep Kepariwisataan

A. *Content of policy* (Isi Kebijakan)

Melihat Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan arah strategi kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kepariwisataan daerah dan nasional. Fakta yang peneliti temui di lapangan, menunjukkan bahwa dikeluarkannya kebijakan tersebut merupakan dalam rangka sebagai daerah otonomi, pemerintah kabupaten banyuwangi untuk melakukan pengembangan kepariwisataan daerahnya.

Content of policy (isi kebijakan) menunjukkan hasil yang cukup baik pada kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen, tetapi tidak secara menyeluruh masih terdapat kekurangan. Dimana *context of implementation* (konteks implementasi) menunjukkan hasil yang kurang baik, akan tetapi perpaduan kedua kategori tersebut menghasilkan *outcomes* (dampak) yang masih baik. Maknanya, terdapat faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam rangka mewujudkan kepariwisataan yang ekowisata dan berbasis internasional.

Untuk memudahkan penjelasan implementasi pengembangan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen, maka akan peneliti sampaikan temuan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Grindle dalam penjelasan indikator-indikator bawah ini:

1) Kepentingan yang terpengaruh kebijakan

Dalam implementasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan ditemukan benturan kepentingan. Dimana dinas kebudayaan dan pariwisata dibutuhkan adanya kerjasama baik dengan Kepala SKW V Banyuwangi BBKSDA Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penemuan hasil penelitian ini mengalami perubahan dimana terdapat pihak lainnya yang berkepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai dengan pemberian tugas yang diberikan sebagai *leading sector* implementasi kebijakan pariwisata oleh Kepala Daerah sedangkan BBKSDA merupakan perwakilan pemerintah pusat untuk mengelola kawasan hutan lindung, cagar alam dan kawasan taman wisata alam. Penemuan ini memiliki perbedaan dengan penemuan yang dilakukan oleh Irawan yang menjelaskan dengan teori edward III indikator wewenang bahwa dalam implementasi, pelaksanaan wewenang tidak terjadi masalah yang berkaitan dengan kompetensi dan variabel di luar kebijakan seperti benturan kepentingan (Irawan, 2015)

Penemuan lainnya yang didapatkan, bahwa seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan BBKSDA Provinsi Jawa Timur serta masyarakat tidak terpengaruh kebijakan pembangunan kepariwisataan, dimana tidak terdapat secara signifikan resisten (berasal dari aparatur) karena dianggap telah memahami kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi resisten itu dikarenakan perbedaan dalam menangkap dan memahami kebijakan yang berbeda antara Perda Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: p.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak. Perbedaan juga terlihat pada Perda Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan daya saing wisata. Hal ini seharusnya seluruh kepentingan masing-masing pihak harus dipinggirkan agar terlaksananya pembangunan kepariwisataan yang baik.

2) Tipe manfaat

Dalam suatu implementasi kebijakan akan terdapat suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan agar menciptakan manfaat dari kebijakan tersebut. Peneliti menemukan 2 (dua) manfaat yang ingin dihasilkan oleh pembangunan kepariwisataan yaitu manfaat untuk pemerintah dan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat sekitar telah merasakan manfaat dari penerapan pembangunan kepariwisataan yaitu peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi serta meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah. Sedangkan bagi masyarakat menumbuhkan daya usaha masyarakat yang akan mampu meningkatkan perkonomian masyarakat melalui pendapatan dari kunjungan wisatawan. Penulis juga mendapat data Rata-Rata *Spending of Money* Wisatawan Mancanegara Rp. 3.700.000.000 dari kunjungan wisatawan domestik 5.039.934 orang dan wisatawan asing 127.420 orang (Pembab. Banyuwangi, 2019). Selain ketiga manfaat di atas, maka melalui pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terwujud destinasi pariwisata nasional yang mampu berkembang menjadi kepariwisataan internasional.

3) Perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diharapkan sesuai kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan orientasi kepada masyarakat yang diharapkan dalam peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemasaran pariwisata. Peningkatan infrastruktur pariwisata merupakan pembangunan sarana dan prasarana utama dan penunjang yang dapat dirasakan oleh pengunjung destinasi wisata. Selain itu pemasaran yang diinginkan masyarakat telah dijawab dengan inovasi bupati anas dengan diadakan pemasaran pariwisata melalui banyuwangi festival yang terdapat agenda khusus di Kawah Ijen yaitu Ijen Jazz Festival.

Perubahan signifikan telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam hal pelayanan pariwisata yang awalnya belum terdapat pelayanan yang prima (adanya *Tourist Information Center*) serta jalur jalan menuju ke kawasan TWA Kawah Ijen telah lebih baik meskipun belum dapat dikatakan baik. Sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan destinasi wisata telah dibangun dan sangat dirasakan oleh pengunjung.

4) Kedudukan pengambilan keputusan

Terkait dengan implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam penelitian ini, melihat suatu kedudukan pengambilan keputusan melalui parameter kecenderungan sikap:

- a. Kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan pengembangan pariwisata;
- b. Respons atas pelaksanaan kebijakan pariwisata tersebut.

Secara umum persepsi pelaksana terhadap kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah mendukung penuh. Selain alasan untuk kemajuan daerah, para pelaksana mendukung karena pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai seorang aparatur sipil negara. Para pelaksana di dinas yang menjadi

leading sector kebijakan pariwisata cukup aktif dalam mengoordinasikan semua hal teknis mengenai implementasi kebijakan yang akan melibatkan badan/organisasi pelaksana lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis mengategorikan kecenderungan/persepsi resisten setelah melakukan sejumlah wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan. Terdapat 2 (dua) kategori kecenderungan/persepsi yang dimana menolak atau (keberatan) dengan kebijakan yang dimaksud. Mengenai kecenderungan sikap juga dibenarkan dalam penelitian oleh Syahmeiza yang menyimpulkan penelitian bahwa Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang belum efektif terlihat pada tingkat kepatuhan masih rendah dan kurang lancarnya rutinitas fungsi Disbudpar Empat Lawang yang menyebabkan kinerja kebijakan belum sesuai dengan yang diinginkan serta dampak yang dikehendaki belum tercapai (Syahmeiza et al., 2011).

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dimana bergantung pada kecenderungan publik untuk merespons kebijakan dan implementasinya. Kebijakan pengembangan pariwisata yang paling baik memang seharusnya melibatkan publik, terutama komunitas masyarakat lokal. Dan kesimpulannya letak pengambilan keputusan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi dimana inovasi diinisiasi oleh pemimpin daerah sebagai pemegang keputusan tertinggi pada level Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dimana diambil juga dalam bukunya yang berjudul *Anti-Mainstream Marketing: "20 Jurus Mengubah Banyuwangi*, yang dijelaskan beberapa inovasi pembangunan kepariwisataan kabupaten banyuwangi (Anas, 2019).

5) Para pelaksana program

Dalam suatu implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan diukur pada kemampuan pelaksana kebijakan tersebut. Dimana kemampuan tersebut merupakan bagaimana pelaksana kebijakan mampu memberikan informasi yang baik untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan sesuai rencana.

Suatu implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh seluruh individu yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan komunikasi secara cepat oleh pelaksana kebijakan. Kemampuan para pelaksana kebijakan disini merupakan faktor penentu implementasi kebijakan. Sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriwan, menjelaskan bahwa 3 (tiga) hal utama dalam komunikasi kebijakan adalah

kemampuan pelaksana dalam pemberian informasi, kejelasan sasaran dan tujuan, dan konsistensi (Irawan, 2015)

Para pelaksana kebijakan dalam hal ini bukan hanya sebagai pimpinan tertinggi tetapi seluruh pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Jumlah sumber daya aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjadi faktor penentu juga. Peneliti menemukan hasil bahwa aparatur yang terdapat di Disbudpar yang memiliki latar belakang pendidikan IT yang cukup tetapi rata-rata tidak sesuai dengan kemampuan dalam bidang kepariwisataan. Sementara di Disbudpar telah meningkatkan kompetensi aparaturnya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

6) Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan segala sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di TWA Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. Sumberdaya yang melaksanakan kebijakan meliputi sebagai berikut:

a. Staf yang memadai dalam keahliannya

Dari segi jumlah pelaksana untuk masing-masing program kebijakan, telah dianggap mencukupi dengan jumlah staf pelaksana di Disbudpar yang menjadi leading sector sebanyak 96 orang. Hal tersebut memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eri Irawan yang menjelaskan sisi *size* pelaksana untuk masing-masing program kebijakan, sebenarnya belum mencukupi (lemah) jika dibebankan hanya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Irawan, 2015)

Dari segi *skill* (kemampuan / kompetensi) pelaksana kebijakan ditemukan dari hasil penelitian diketahui, bahwa inkompetensi terjadi karena latar belakang pendidikan staf tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya saat ini. Harapannya, kompetensi pelaksana kebijakan bisa mengalami peningkatan sejalan sesuai dengan rutinitas dan pengalaman yang didapatkan.

b. Fasilitas

Fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata di Banyuwangi telah cukup baik. Fasilitas tersebut terdiri atas dukungan pendanaan maupun fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk pengembangan kepariwisataan daerah. Dukungan pendanaan didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sesuai dengan teori

kepariwisataan di mana pengembangan destinasi wisata sebagai bagian dari keterkaitan dalam sistem kepariwisataan perlu memperhatikan sejumlah aspek berikut (Sunaryo, 2013, hal. 27-31):

1. Atraksi dan daya tarik wisata
2. Amenitas (akomodasi)
3. Aksesibilitas
4. Infrastruktur pendukung
5. Fasilitas pendukung
6. Kelembagaan dan sumberdaya manusia

Dari segi fasilitas, dukungan penuh diberikan untuk implementasi kebijakan meski dalam beberapa sisi dukungan tersebut menghasilkan perubahan negatif. Hal ini sebagian kecil sama dengan penelitian yang dilakukan Eri Irawan, bahwa dukungan faktor sumberdaya dalam kerangka Edwards masih tampak mengalami kekurangan pada aspek staf terutama dari sisi kompetensi (Irawan, 2015)

B. *Context of implementation (Konteks Implementasi)*

Peneliti akan menjelaskan secara signifikan indikator sebagai berikut:

1) Kekuasaan, kepentingan, strategi pelaksana yang terlibat

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata, Pemkab Banyuwangi juga melibatkan banyak pihak. Keterlibatan pihak tersebut merupakan suatu tim kerja sama pengembangan pariwisata alam untuk penguatan pengembangan kepariwisataan yang telah dilakukan. Pelibatan semakin banyak organisasi pelaksana lain (para pemangku kepentingan) akan dapat juga berisiko menyulitkan implementasi kebijakan. Hogwood dan Gunn dalam buku (Solichin, 2008) menyatakan, salah satu syarat implementasi kebijakan bisa lancar adalah jika hubungan ketergantungan organisasi pelaksana dengan pihak lain tidak kompleks. Adanya konflik kepentingan dan tekanan dari berbagai pihak terhadap birokrasi, misalnya dari organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, atau badan pelaksana yang lain.

Seperti Pengelola Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen yang sebelum menjadi Kawasan Taman Wisataa Alam Kawah Ijen dikelola oleh BBKSDA Provinsi Jawa Timur dan SKW V/Banyuwangi sebagai perwakilan. Serta konflik wilayah kawasan kawah ijen yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Hal ini akan menentukan Kekuasaan, Kepentingan dan Startegi dalam pembangunan kepariwisataa di Kawah Ijen.

Terdapat pemahaman yang kurang komprehensif yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso serta BBKSDA Provinsi Jawa Timur terkait pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Kepariwisata di TWA Kawah Ijen terfokus pada peningkatan infrastruktur pariwisata (sarana dan prasarana utama dan penunjang) dan pemasaran pariwisata kawah ijen melalui banyuwangi festival (Ijen Jazz Festival).

Koordinasi antara pihak Disbudpar dan BBKSDA Provinsi Jawa Timur telah terjalin dengan baik. Tetapi masih terdapat hubungan yang belum dikatakan baik dikarenakan masih terdapat perebutan wilayah kawasan wisata kawah ijen oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kedua Pemerintah daerah masih terdapat perbedaan strategi dan perencanaan dalam penerapan pembangunan kepariwisataan dari pelaksana kebijakan yang terlibat.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa belum terlihat di dalam struktur birokrasi yang jelas. Sesuai dengan penelitian Eri Irawan pada tahun 2015 dengan menggunakan teori Edward III, terdapat dua aspek terpenting dalam struktur birokrasi ketika mengimplementasikan kebijakan adalah prosedur operasional kerja standard (*Standard Operating Procedure/SOP*).

Aspek ini yang jadi titik poin pembahasan penelitian struktur birokrasi di bagian ini. Dalam penelitian diketahui telah adanya SOP yang baku untuk pelaksanaan kebijakan. Meski tidak ada SOP secara formal, acuan pelaksanaan operasional dalam kebijakan pariwisata ada dalam berbagai dokumen hasil koordinasi/rapat untuk implementasi kebijakan. Hasil analisa yang dilakukan penulis, memiliki kesamaan pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten lainnya oleh Ali Yusri yang menjelaskan pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata harus memiliki *Standart Operation Procedur* (SOP) dan berlandaskan RENSTRA untuk melakukan kinerja dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak (Yusri & Salrahmanda, 2015)

Adanya SOP dan berlandaskan RENSTRA yang berbentuk *master plan/site plan* sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman pengembangan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh V. Pratama yang mengatakan bahwa *Master Plan* Pengembangan Pariwisata Daerah Kampar, kemudian diharapkan mampu

meningkatkan pengembangan pariwisata di Kampar (Pratama & Asrida, 2018).

Penemuan peneliti dalam karakteristik lembaga dan penguasa telah terlihat di dalam Renstra Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi dan *Site Plan/Master Plan* yang jelas. Meskipun belum terdapat secara khusus belum adanya SOP yang mengikat kebijakan pembangunan kepariwisataan. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hajar Ratna Sari yang meneliti mengenai pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gresik dijelaskan bahwa Saat ini kawasan wisata yang ada di pulau bawean berada dibawah lindungan BKSDA (Badan Kepariwisata Sumber Daya Alam) (Sari, 2018)

3) Kepatuhan dan daya tanggap

Dalam implementasi kebijakan pemerintah dibutuhkan dukungan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, hal tersebut berupa kecenderungan publik (klien dari pelaksana kebijakan) yang memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang baik untuk menerima dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sesuai dengan teori Edward III mengenai kecenderungan sikap juga dibenarkan dalam penelitian oleh Syahmeiza yang menyimpulkan penelitian bahwa Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang belum efektif terlihat pada tingkat kepatuhan masih rendah dan kurang lancarnya rutinitas fungsi Disbudpar Empat Lawang yang menyebabkan kinerja kebijakan belum sesuai dengan yang diinginkan serta dampak yang dikehendaki belum tercapai (Syahmeiza et al., 2011).

Disimpulkan bahwa Kesuksesan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kepatuhan dan daya tanggap yang baik untuk memahami dan merespons suatu implementasi kebijakan. Kebijakan pengembangan pariwisata yang paling baik memang seharusnya mampu melibatkan publik, terutama pada komunitas masyarakat lokal serta sektor swasta.

Dan ditemukan juga oleh peneliti masih terdapat ego sektoral di tiap Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso serta BBKSDA terkait pengelolaan pembangunan kepariwisataan di kawasan TWA Kawah Ijen. Kurangnya hubungan komunikasi baik antara pihak untuk melakukan persamaan persepsi dan pemikiran untuk menerima saran dalam peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemasaran pariwisata.

C. Hasil Akhir Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kawah Ijen

Untuk mengukur proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) pada kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Akan dijelaskan 2 faktor untuk mengukur keberhasilan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Dampak pada masyarakat secara individu dan kelompok

Kelompok sasaran implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen pada seluruh pelaksana kebijakan seperti ASN Disbupar dan Masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Dimana akan merasakan dampak yang signifikan pada penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta dalam pengembangan pariwisata daerah.

Masyarakat sekitar kawasan kawah ijen yang terletak pada Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi memperoleh dampak yang positif pasca diterapkannya pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen. Dampak positif berupa meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan daya cipta ekonomi, dan menciptakan UMKM Daerah. Meskipun secara garis besar belum signifikan meningkatkan perekonomian daerah kabupaten banyuwangi melalui PAD, hanya sekedar dari pajak dan redistribusi dari kunjungan wisatawan ke kawasan destinasi wisata alam.

- 2) Perubahan dan Penerimaan yang terjadi pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Kelompok sasaran implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen pada seluruh pelaksana kebijakan seperti ASN Disbupar dan Masyarakat sekitar kawasan wisata alam pasca diterapkannya pembangunan kepariwisataan. Diterapkan kebijakan ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan perubahan dan dapat diterima oleh seluruh *stakeholders* dari pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan di kawasan taman wisata alam kawah ijen kabupaten banyuwangi.

Perubahan dan Penerimaan yang diberikan oleh ASN disbupar dan masyarakat sekitar kawasan kawah ijen Kabupaten Banyuwangi adalah mengalami perubahan daya pikir dan daya cipta perekonomian untuk meningkatkan ekonomi melalui *home stay* yang terdapat di kawasan kawah ijen. Hasil penelitian ini ditemukan perkembangan *home stay* di kawasan destinasi wisata di kabupaten banyuwangi mengalami peningkatan yang sangat cepat (Pemkab. Banyuwangi, 2019). Hal ini

menunjukkan perubahan dan penerimaan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dampak yang positif menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian proses kebijakan pembangunan kepariwisataan di kawasan TWA Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu ada menerima dan dukungan secara penuh terhadap pembangunan kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata dan pemasaran pariwisata. Meskipun terdapat saran dari pengamat ekosistem dan alam bahwa pembangunan kepariwisataan tidak perlu berlebihan. Hal ini menjadi penemuan yang dilakukan penulis bahwa tidak semua pembangunan akan berjalan sesuai rencana. Tetapi perlu memperhatikan hal yang lainnya. Seperti adanya pembangunan yang akan merusak keindahan alam kawah ijen dan merusak ekosistem yang terdapat di kawasan yang pada awalnya cagar alam kawah ijen.

D. Temuan menarik lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini yakni terdapatnya hambatan dan peluang pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal tersebut juga telah dibahas dalam penelitian sebelumnya oleh Arna A. Manullang, memberikan analisisnya bahwa timbulnya kendala atau permasalahan implementasi disebabkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut (Manullang et al., 2016). Hambatan dalam pembangunan kepariwisataan di kawasan TWA Kawah Ijen yakni kurang kesepahaman, koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pihak, keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia yang profesional dan kompetensi, dan perbedaan persepsi sehingga cenderung ego sektoral.

Selain hambatan tersebut ada juga peluang jika implementasi kebijakan mampu dijalankan dengan baik oleh Pemerintah dan pengelola kawasan Kawah Ijen yakni pengembangan kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan, sehingga diharapkan destinasi Wisata Alam Kawah Ijen menjadi Kawasan Wisata Internasional dengan daya tarik wisatawan yang tinggi. Selanjutnya dibutuhkan hubungan sinergitas antara kedua pihak, dimana merupakan kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan. Sesuai dengan yang disampaikan dalam penelitian Kusuma yang menyimpulkan kunci untuk seluruh proses pembangunan terintegrasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus dipertimbangkan dalam rangka memelihara hubungan satu sama lain. Sinergi antara unsur-unsur harus berjalan sedemikian rupa sehingga efek dari pembangunan terintegrasi akan lebih terasa dari pada setiap *stakeholder* berjalan sendiri-sendiri (Kusuma,

2014). Sesuai juga dengan penelitian Dapkus & Dapkute, yang menjelaskan untuk mencapai pariwisata berkelanjutan pengembangan, upaya sektor publik yang bertujuan untuk memastikan kebijakan pengembangan pariwisata yang jelas serta keterlibatan sektor swasta yang menawarkan produk dan layanan pariwisata yang kompetitif dan kolaborasi timbal balik diperlukan (Dapkus & Dapkute, 2015).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Kawasan TWA Kawah Ijen telah berjalan dengan cukup baik karena tingginya tipe manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, derajat perubahan yang terlihat baik dan sumber daya yang dilibatkan telah mengalami peningkatan, meskipun kepatuhan dan daya tanggap melaksanakan kebijakan masih lemah dikarenakan kurangnya komunikasi antara pengambil kebijakan dengan pelaksana. Tetapi dalam ukuran keberhasilan implementasi kebijakan menghasilkan hal yang positif.

Saran peneliti untuk meningkatkan implementasi kebijakan adalah sinergitas dalam pembangunan kepariwisataan melalui keterlibatan seluruh unsur pelaksana kebijakan, sektor swasta dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi yang bertaraf Internasional, perlunya penelitian lanjutan yang mampu membandingkan antara pengembangan kepariwisataan khususnya pada Kawasan Taman Wisata Alam serupa untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel karya ilmiah pemerintahan ini. Ucapan terima kasih penulis juga berikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur atas bantuan untuk pengumpulan data dan informasi mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kawasan TWA Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR REFERENSI

Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anas, A. A. (2019). *Anti-Mainstream Marketing: "20 Jurus Mengubah Banyuwangi"*. Surabaya: Gramedia Pustaka Utam.

BPS. (2019, Oktober 24). *Pertumbuhan Kawasan Sektor Pariwisata di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.htm>

1

Dapkus, R., & Dapkute, K. (2015). *EVALUATION OF THE REGIONAL TOURISM ATTRACTIVENESS*. <https://www.semanticscholar.org/paper/EVALUATION-OF-THE-REGIONAL-TOURISM-ATTRACTIVENESS-Dapkus-Dapkute/576c7f028030bf6767f59d019cc70a60addcd2d3>

Fitria, A. (2013). Kajian Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada Kawasan Geopark Gunung Sewu. *Prosiding Seminar Nasional; Kebijakan Dan Perencanaan Kota Berwawasan Kesehatan*, 95–102. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_739564442016.pdf

Irawan, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Eri Irawan. In *Jejaring Administrasi Publik. Th VII. Nomor* (Vol. 2). <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp06ec0f4bd1full.pdf>

Kusuma, B. M. A. (2014). PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KOTA PARIWISATA BERTARAF INTERNASIONAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.433>

Mandic, A., Mrnjavac, Ž., & Kordic, L. (2018). Tourism infrastructure, recreational facilities and tourism development. *Tourism and Hospitality Management*, 24(1), 41–62. <https://doi.org/10.20867/thm.24.1.12>

Manullang, A. A., Rengga, A., Suryaningsih, M., & Sulandari, S. (2016). IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) PROPINSI JAWA TENGAH DI DESTINASI WISATA SAM POO KONG KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 365–380. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V5I2.11008>

Novitasari, B. & Wiwin, K. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI OBJEK WISATA PULAU MERAH KABUPATEN BANYUWANGI. In *Citizen Charter* (Vol. 1, Issue 2). Udayana University. <https://media.neliti.com/media/publications/28620-ID-iimplementasi-kebijakan-pembangunan-pariwisata-dalam-peningkatan-sektor-usaha-mi.pdf>

Noveria, D. A. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LINGGA

- DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA TAHUN 2015. Kabupaten Lingga: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pariwisata, d. m. (2019, Desember 29). Djpk. Diambil kembali dari Kementerian Pariwisata: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/PERMENPAR-NOMOR-3-TAHUN-2018-TENTANG-DAK-FISIK-BIDANG-PARIWISATA.pdf>
- Pemkab. Banyuwangi, D. K. (2019, Oktober 24). Kabupaten Banyuwangi. Diambil kembali dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html>.
- Prabhawati, A. (2018). Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pariwisata Budaya Melalui Diplomasi Kebudayaan. *Journal of Tourism and Creativity*, 2(2), 158. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jtc.v2i2.13847>
- Putri, S. D. (2015). Strategic Management of Nature-Based Tourism in Ijen Crater in the Context of Sustainable Tourism Development. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 3(3), 123–129. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2015.003.03.06>
- Sari, H. R. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1275>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syahmeiza, B., Alfatih, A., & Junaidi. (2011). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Negara (JAN)*, II(1), 1–11. https://www.academia.edu/28843903/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_DI_KABUPATEN_EMPAT_LAWANG_PROVINSI_SUMATERA_SELATAN